

Analisis *Stakeholders* dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Program Kampung Iklim (Proklim) sebagai Upaya Mitigasi Perubahan Iklim Dusun Soka, Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang

Gisti Raisy Ismiartha, R. Slamet Santoso, Retna Hanani
Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

ABSTRAK

Program Kampung Iklim adalah program berlingkup nasional yang dilakukan sebagai upaya adaptasi serta mitigasi perubahan iklim dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan keterlibatan pemangku kepentingan lainnya. Kerjasama antar aktor menjadi salah satu kunci utama karena upaya mengurangi dampak perubahan iklim harus dilaksanakan secara multipihak pada setiap skala. Dusun Soka merupakan salah satu wilayah yang telah mengimplementasikan program tersebut dengan nama Proklim Sokaku Asri. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah pengelolaan sampah melalui kelompok masyarakat TPS3R Sokaku Asri dan Bank Sampah Soka Resik. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis jejaring *stakeholder* dalam keberlangsungan kegiatan pengelolaan sampah pada Program Kampung Iklim (Proklim) Sokaku Asri. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian jejaring aktor yang dilakukan dengan teknik *net mapping*, diketahui bahwa terdapat tujuh belas aktor yang berasal dari klasifikasi sektor pemerintah, sektor privat, masyarakat, kelompok masyarakat, LSM, media massa, serta badan hukum publik. Setiap pengaruh yang dihasilkan oleh ketujuh belas aktor kemudian membentuk jejaring dengan jenis dan tingkat pengaruh yang berbeda. Secara keseluruhan, terdapat 52 pengaruh yang dihasilkan serta 5 hubungan yang saling menguntungkan.

Kata Kunci : Proklim, Analisa *Stakeholders*, Net Map

ABSTRACT

Program kampung iklim (Proklim) is a national program that is implemented to prevent climate change by adaptation and mitigation process, it prioritizes communities and other stakeholders empowerment. Cooperation between stakeholders is one of the main keys because actions of preventing the impact of climate change must be carried out by multi-actors at every scale. Soka village is one of the areas that has implemented Proklim, it is named Proklim Sokaku Asri. One of the activities carried out is the process of waste management through TPS3R Sokaku Asri and Soka Resik Waste Bank. This research was conducted to identify and analyze stakeholder mapping in the sustainability of waste management activities in Proklim Sokaku Asri. The approach that used is descriptive qualitative with some collection techniques, they are observation, interviews, documentation and literature study. There are some research results formed by net map stakeholders mapping technique, it is known that there are seventeen actors from the government sector, private sector, society, community groups, NGOs, mass media, and public legal entities. The actors influence other actors with different types and levels of influence. Overall, there are 52 influences and 5 mutually beneficial relationships that resulted by the stakeholders mapping.

Keywords: Proklim, Stakeholders Mapping, Net Map

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup memiliki hubungan yang sangat erat dengan kehidupan manusia. Ketergantungan manusia terhadap lingkungan hidup mengharuskan manusia untuk mengetahui hal-hal penting yang harus dilakukan dalam menjaganya melalui upaya yang disebut dengan pengelolaan lingkungan. Pengelolaan lingkungan merupakan upaya bersama semua pihak melalui pengembangan kemitraan antara berbagai pihak seperti pemerintah, dunia usaha, organisasi masyarakat serta masyarakat secara luas. Pengelolaan lingkungan juga dilakukan sebagai salah satu upaya dalam pencegahan permasalahan atau kerusakan lingkungan yang termasuk didalamnya perubahan iklim.

Di Indonesia sendiri, upaya dalam pengendalian perubahan iklim dinilai sangat penting terutama di daerah-daerah yang teridentifikasi rentan terhadap adanya perubahan iklim. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, KLHK berupaya mengurangi dampak perubahan iklim dengan mendorong kemitraan serta kolaborasi berbagai pihak yang bertujuan supaya mampu memperkuat kapasitas seluruh upaya adaptasi dan mitigasi perubahan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan Program Kampung Iklim (Proklam) yang diatur pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2012 tentang Program Kampung Iklim.

Proklam adalah suatu program pada tingkat lokal yang dilakukan dengan skala nasional. Program ini diiniasi oleh KLHK sebagai bentuk pengelolaan dan pelestarian lingkungan, serta pemanfaatan potensi di sekitar wilayah setempat, proklam bertujuan untuk mengurangi dampak perubahan iklim dengan memberdayakan masyarakat setempat untuk turut berkontribusi pada

setiap upaya adaptasi dan mitigasi yang dilakukan.

Pelaksanaan proklam di berbagai wilayah di Indonesia juga diharapkan dapat memberikan manfaat berupa kontribusi skala lokal dalam mencapai target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Nasional. Proklam juga memanfaatkan potensi pengembangan wilayah di tingkat lokal serta sajiannya dalam bentuk data dan informasi yang menjadi bahan untuk dapat diolah dalam proses formulasi kebijakan, program, kegiatan serta strategi untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Guna mencapai manfaat tersebut,

Secara umum, pelaksanaan Program Kampung Iklim di Indonesia telah melibatkan beberapa aktor kepentingan. Berdasarkan laporan kinerja Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) KLHK disebutkan bahwa pelaksanaan proklam telah dibersamai dengan implementasi fungsi sinergisitas, integrasi, koordinasi serta *leadership*. Hal tersebut menunjukkan bahwa aktor pemberdayaan tidak hanya berasal dari kelompok masyarakat semata, tetapi juga aktor dari klasifikasi lain seperti pemerintah dari berbagai lini, lembaga swadaya masyarakat, sektor privat, masyarakat, kelompok masyarakat hingga lembaga pers.

Strategi tersebut juga didukung oleh berbagai provinsi termasuk Jawa Tengah yang menerapkannya melalui pengembangan kemitraan pada pelaksanaan program kampung iklim yang memiliki sinergisitas antar *stakeholders*, diantaranya meliputi akademisi, media massa, pemerintah, dunia usaha, masyarakat serta LSM. Secara lebih spesifik, salah satu contoh daerah yang telah mengimplementasikan konsep jejaring kebijakan dalam Program Kampung Iklim adalah Kabupaten Semarang yang memiliki 21 Kampung Iklim sehingga membuat Kabupaten Semarang berada di tingkat kedua

dengan ProKlim terbanyak di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini sekaligus membuat proses kerjasama antar *stakeholder* dapat dikatakan semakin kompleks.

Di Kabupaten Semarang sendiri, salah satu ProKlim yang menjadi sorotan adalah ProKlim Sokaku Asri, Desa Lerep yang telah memasuki tahap verifikasi. ProKlim Sokaku Asri memiliki upaya adaptasi berupa pengendalian banjir melalui pembuatan biopori dan panen air hujan serta peningkatan ketahanan pangan melalui penanaman tanaman penunjang kehidupan, dan upaya mitigasi berupa pengelolaan sampah, limbah padat dan cair. Namun, penelitian ini hanya menyoroti kegiatan pengelolaan sampah karena merupakan sorotan keberadaan ProKlim Sokaku Asri melalui keberadaan Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS3R) Sokaku Asri, Bank Sampah Soka Resik serta upaya daur ulang yang terjadi di dalamnya. Meski telah menjadi sorotan, diketahui bahwa dalam pelaksanaannya muncul berbagai macam kendala yang terjadi meliputi:

- a. Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait permasalahan perubahan iklim secara keseluruhan sehingga menciptakan kejenuhan yang terjadi dalam proses pengelolaan sampah.
- b. Munculnya berbagai pertanyaan dari masyarakat mengenai keberlanjutan arah gerak setelah pengusulan dan implementasi proklim berjalan
- c. Kegiatan evaluasi dan pemantauan yang sering dilewatkan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan kegiatan pada proklim
- d. Peran akademisi yang belum tampak secara jelas
- e. Media promosi yang belum berjalan dengan baik seperti proklim wilayah lain
- f. Pengisian Sistem Registri Nasional yang dianggap rumit serta SDM yang kurang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, diketahui bahwa terdapat berbagai macam aktor pemberdayaan pada kegiatan pengelolaan sampah ProKlim Sokaku Asri yang keterlibatannya mendukung ketercapaian tujuan pemberdayaan tersebut. Setiap aktor yang terlibat memiliki peran sesuai tugas dan fungsi yang berbeda, sehingga penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana konsep jejaring kebijakan digunakan dalam keberlangsungan kegiatan pengelolaan sampah sebagai bentuk pelaksanaan Program Kampung Iklim Sokaku Asri?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan Desain penelitian deskriptif. Lokus penelitian ini adalah ProKlim Sokaku Asri di Dusun Soka sementara fokusnya adalah fokusnya adalah analisis peran aktor yang memiliki keterlibatan dalam Program Kampung Iklim Sokaku Asri serta bentuk hubungan antar aktor yang dibangun. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dapat berupa kata tertulis, teks, dan frasa yang mendeskripsikan subjek serta tindakan yang terjadi di lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil wawancara dengan responden dan data sekunder yang digunakan diperoleh melalui studi pustaka, dokumen regulasi, serta penelitian terdahulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Schiffer (dalam LAN RI, 2015) memperkenalkan *Net map* sebagai alat pemetaan berbasis wawancara yang membantu orang memahami, memvisualisasikan, mendiskusikan dan meningkatkan situasi di mana banyak aktor yang berbeda mempengaruhi hasil. Schiffer (dalam LAN RI, 2015) juga menjelaskan empat langkah yang dapat dilakukan untuk menganalisis *stakeholders* dengan teknik *net mapping*, meliputi:

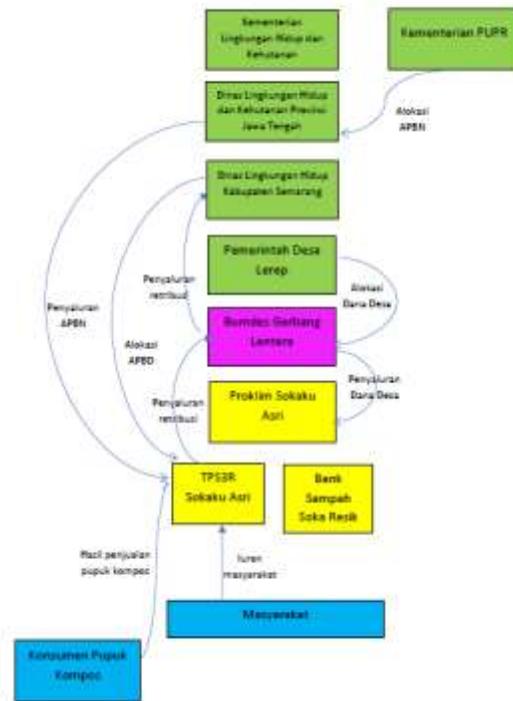
pengelolaan sampah di Dusun Soka, di antaranya meliputi mendorong pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh aktor dari klasifikasi kelompok masyarakat, membantu proses penganggaran yang dilakukan oleh aktor dari klasifikasi pemerintah, mendorong penciptaan kebersihan lingkungan yang dilakukan oleh aktor dari klasifikasi kelompok masyarakat, serta sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dan upaya menunaikan amanat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dilakukan oleh aktor dari klasifikasi pemerintah.

b. Penganggaran Kegiatan

Mahsun (2019) menyatakan bahwa penganggaran atau penyusunan anggaran (*budgeting*) adalah proses penyusunan rencana keuangan yang dilakukan dengan menyusun rencana kerja dalam waktu tertentu dan dinyatakan dalam satuan moneter. Penganggaran merupakan bagian dari proses perencanaan organisasi yang secara umum meliputi perencanaan strategi, penyusunan program, dan penyusunan anggaran.

Terdapat lima jenis sumber penganggaran pada kegiatan pengelolaan sampah Dusun Soka meliputi APBN, APBD, dana desa, iuran masyarakat serta lain-lain yang digambarkan melalui skema berikut:

Gambar 1.2.
Skema Jejaring Aktor pada Indikator Penganggaran Kegiatan



Sumber: Analisa Penulis

Berdasarkan skema tersebut, diketahui terdapat sumber penganggaran pertama kegiatan pengelolaan sampah adalah APBN yang dialokasikan Kementerian PUPR sebesar Rp. 500.000.000,- sebagai dana pembangunan TPS3R Sokaku Asri.

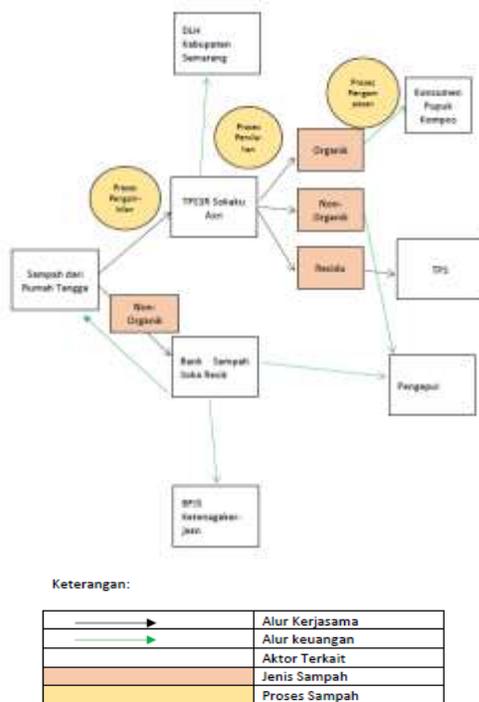
Sumber dana kedua diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang yang mengalokasikan APBD sebesar Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 600.000,- setiap bulan. Dana tersebut digunakan sebagai bantuan dana operasional berupa bahan bakar minyak (BBM) baik bagi dua buah mesin pengolah sampah di TPS3R serta dua buah kendaraan tossa yang diperuntukkan guna mengambil sampah dari setiap rumah anggota TPS3R Sokaku Asri.

Terdapat pula sumber pendanaan lain melalui iuran masyarakat yang terdaftar sebagai anggota TPS3R Sokaku Asri. Iuran

yang dibayarkan setiap rumah tangga sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah). Alokasi dana tersebut dibagi kepada dua kebutuhan, yaitu Rp. 12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) yang diperuntukkan sebagai dana operasional TPS3R meliputi pendapatan empat pekerja TPS3R, sementara sisanya sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) disalurkan bagi kewajiban pembayaran retribusi sampah yang diberikan kepada DLH Kabupaten Semarang.

Selain sumber pendanaan, terdapat pula alur perputaran penganggaran yang terjadi dan digambarkan melalui skema berikut:

Gambar 1.3.
Alur Penganggaran Kegiatan Pengelolaan Sampah Dusun Soka



Sumber: Analisa Penulis

Melalui gambar terlampir di atas, diketahui terdapat tumpang tindih kewenangan antara TPS3R Sokaku Asri dan Bank Sampah Soka Resik dalam rangka pengelolaan sampah non-organik. Berdasarkan Petunjuk Teknis TPS3R,

disebutkan bahwa TPS3R hanya dapat mengolah sampah organik, sementara sampah non-organik merupakan kewenangan Bank Sampah di setiap wilayah sehingga pada perputaran keuangan Bank Sampah tidak kehilangan porsinya karena kehadiran TPS3R.

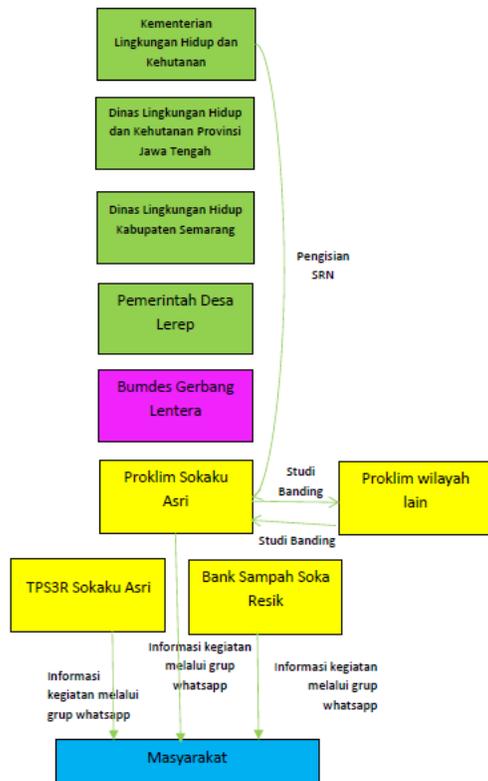
Peneliti juga menemukan adanya tumpang tindih kewenangan yang terjadi karena minimnya koordinasi antara Bank Sampah Soka Resik dan TPS3R Sokaku Asri. Hal ini berpengaruh pada berkurangnya pendapatan bagi Bank Sampah Soka Resik karena TPS3R Sokaku Asri langsung menjual sampah non-organik kepada pengepul sampah dengan harga rata-rata sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, sementara Bank Sampah Soka Resik hanya melakukan penjangkauan sampah non-organik langsung dari masyarakat Dusun Soka tanpa memperoleh kumpulan sampah non-organik dari TPS3R Sokaku Asri.

c. Data dan Informasi

Menurut Pendit (dalam Ati, 2014), data adalah hasil observasi langsung terhadap suatu kejadian yang merupakan perlambangan mewakili objek atau konsep dalam dunia nyata. Hal ini dilengkapi dengan nilai tertentu. Sementara informasi adalah segala yang kita komunikasikan, seperti yang disampaikan oleh seseorang lewat bahasa lisan, surat kabar, video, dan lain-lain.

Analisis peran antar aktor pada indikator data dan informasi dapat dilihat melalui skema berikut:

Gambar 1.4.
Skema Jejaring Aktor pada Indikator Data dan Informasi



Sumber: Analisa Penulis

a. Data

Pada indikator ini, diketahui bahwa data terpusat pada Sistem Registri Nasional yang dapat diakses oleh seluruh admin pengurus Proklim di seluruh Indonesia. Sistem Registri Nasional yang selanjutnya disebut SRN Perubahan Iklim menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 Tentang Program Kampung Iklim adalah sistem pencatatan data dan penyediaan informasi pengendalian perubahan iklim di Indonesia. SRN juga disebut sebagai rumah pengelolaan data dan informasi terkait kegiatan maupun sumber daya yang mendukung pelaksanaan dan keberlangsungan upaya pengendalian perubahan iklim di Indonesia (*Peluncuran*

Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI), 2016).

Pada pengisian data di SRN, ditemukan sebuah kendala sulitnya memberikan keterangan keberjalanan karena beberapa data yang diperlukan bersifat rigid, sementara kemampuan sumber daya pengisi hanya sebatas pengisian secara general.

Hal ini juga disebabkan karena bentuk koordinasi antar kelompok masyarakat yang kurang menjangkau aspek *monitoring* dan evaluasi. Upaya *monitoring* dan evaluasi dapat digunakan sebagai upaya optimalisasi dalam pengisian sistem registri nasional sehingga tidak hanya membebaskan satu penanggung jawab saja. Hal tersebut juga disampaikan oleh Ketua Proklim Sokaku Asri yang menyatakan bahwa jangka waktu *monitoring* dan evaluasi jarang dilaksanakan dikarenakan setiap pengurus memiliki kesibukan masing-masing termasuk dalam pekerjaannya. Bagaimanapun, pada proses kebijakan berlaku *policy cycle* yang termaktub dalam kebijakan publik, yaitu formulasi, implementasi, evaluasi, dan reformasi (Hayat, 2018), sehingga perencanaan dan implementasi suatu program dan kegiatan harus dilengkapi dengan evaluasi sebagai upaya penilaian keberjalanan suatu program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dan dapat menunjang peningkatan pelayanan yang akan diberikan terhadap masyarakat Dusun Soka.

b. Informasi

Perolehan informasi pertama berasal dari kegiatan studi banding yang dilakukan oleh Proklim Sokaku Asri ke wilayah lain atau sebaliknya. Kegiatan ini merupakan hal yang bermanfaat karena di dalamnya memuat pertukaran informasi dua pihak proklim terkait pelaksanaan proklim di masing-masing wilayah beserta inovasi-inovasi yang dapat diserap sebagai contoh rencana implementasi keberlanjutan yang akan dilakukan. Terdapat beberapa lokasi studi

banding yang dilakukan oleh Proklim Sokaku Asri, salah satunya adalah Proklim Desa Randugunting yang terletak di Kabupaten Temanggung. Kegiatan kunjungan juga dilakukan berdasarkan kesesuaian kegiatan yang dilakukan antara Proklim Sokaku Asri dan proklim wilayah lain atau sebaliknya, hal ini dilakukan sebagai upaya optimalisasi kebermanfaatannya dari kegiatan studi banding itu sendiri.

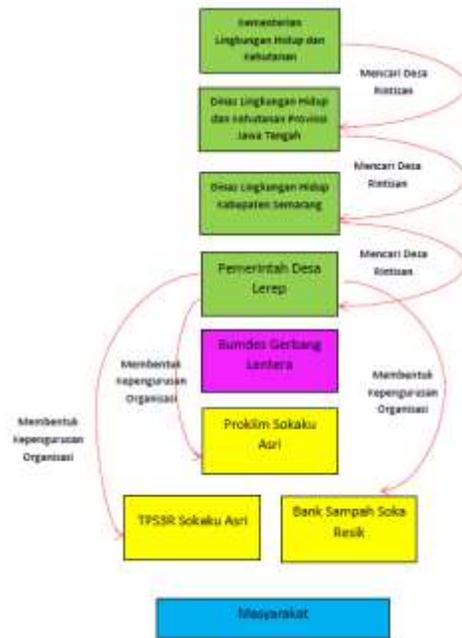
Penjelasan lain terkait informasi juga ditunjukkan dengan adanya arus informasi antara kelompok masyarakat Proklim Sokaku Asri, Bank Sampah Soka Resik, serta TPS3R Sokaku Asri kepada masyarakat Dusun Soka. Penyaluran informasi ini dilakukan dengan pendekatan *top-down*. Adapun informasi yang diberikan meliputi informasi terkait kegiatan pada Proklim Sokaku Asri. Sebagai upaya penyebaran informasi kepada masyarakat terkait berbagai kegiatan, kelompok masyarakat Proklim Sokaku Asri, Bank Sampah Soka Resik dan TPS3R Sokaku Asri menggunakan media sosial grup whatsapp sebagai upaya efisiensi alur penyebaran informasi. Khusus bagi Bank Sampah Soka Resik, grup whatsapp digunakan sebagai sarana penyampaian informasi terkait jam operasional Bank Sampah Soka Resik dan pemberitahuan apabila Bank Sampah Soka Resik telah dibuka pada Hari Minggu pagi. Selain itu, grup whatsapp bagi Bank Sampah Soka Resik juga digunakan sebagai sarana penyampaian informasi apabila terdapat warga yang kesulitan untuk membawa sampah yang ingin ditabung kepada Bank Sampah Soka Resik.

d. Arus Perintah

Arus perintah merupakan salah satu indikator hubungan antar aktor selain *advice* dan *funding* atau penganggaran kegiatan (Schiffer, 2008). Arus perintah merupakan salah satu bentuk instruksi dari satu pihak kepada pihak lainnya guna mengontrol arah

instruksi antara satu aktor kepada aktor lain. Terdapat dua macam perintah yang muncul dalam kegiatan pengelolaan sampah Proklim Sokaku Asri. Pertama, perintah dalam pencarian desa rintisan. Kedua, perintah dalam pembentukan struktur kepengurusan kelompok masyarakat. Adapun berikut merupakan peran setiap aktor yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh aktor lain dalam pemberian perintah :

Gambar 1.5.
Skema Jejaring Aktor pada Indikator Perintah



Sumber: Analisa Penulis

Berdasarkan skema yang tergambar di atas, perintah yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan sampah Proklim Sokaku Asri bersifat vertikal serta memiliki pendekatan *top-down*. Perintah yang digambarkan dimulai oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada DLHK Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mengusulkan desa rintisan untuk dijadikan Proklim. Perintah tersebut diturunkan secara hirarki birokrasi kepada DLH Kabupaten Semarang dan berakhir di Pemerintah Desa

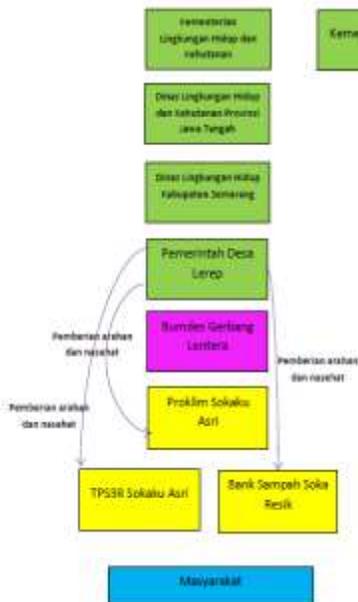
Lerep untuk ditindaklanjuti hingga Dusun Soka terpilih sebagai salah satu desa rintisan proklam.

Kedua, perintah dalam pembentukan kepengurusan setiap kelompok masyarakat yang terlibat, baik itu Proklam Sokaku Asri, TPS3R Sokaku Asri, serta Bank Sampah Soka Resik. Perintah tersebut diberikan oleh Pemerintah Desa Lerep kepada setiap penanggungjawab terpilih. Pembentukan kepengurusan bertujuan untuk mengetahui suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi serta memperjelas tugas pokok dan fungsi dari setiap pengurus.

e. Pemberian Advice

Pemberian *advice* merupakan salah satu upaya yang dilakukan antar aktor selain *command* atau perintah dan *funding* atau penganggaran kegiatan (Schiffer, 2008). Berikut merupakan skema peran setiap aktor dalam hal pemberian *advice* atau nasehat:

Gambar 1.6.
Skema Jejaring Aktor pada Indikator Pemberian Advice



Sumber: Analisa Penulis

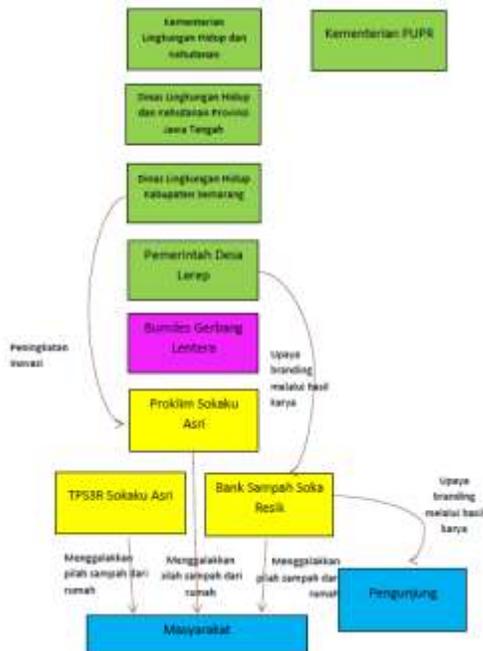
Berdasarkan skema sebagaimana tergambar di atas, diketahui bahwa bentuk *advice* yang diberikan dapat berupa arahan terkait setiap kegiatan hingga saran dan masukan terhadap permasalahan organisasi yang tidak dapat ditangani secara internal kepengurusan. Setiap ketua atau direktur kelompok masyarakat yang bersangkutan juga menyatakan bahwa *advice* atau saran cenderung bersifat opsional dan tidak menjadi hal wajib yang terjadwalkan secara rutin atau berkala karena pemberian *advice* cenderung terjadi apabila terdapat suatu permasalahan pada kelompok masyarakat yang tidak dapat ditangani secara internal kepengurusan sebagaimana telah terstruktur.

Adapun pemberian *advice* lebih banyak dilakukan oleh Kepala Desa Lerep kepada kelompok masyarakat baik Proklam Sokaku Asri, TPS3R Sokaku Asri maupun Bank Sampah Soka Resik sesuai dengan kebutuhan kelompok masyarakat tersebut, hal ini dikarenakan Bapak Sumariyadi selaku Kepala Desa Lerep dianggap tetua serta tokoh masyarakat di Desa Lerep sehingga sangat wajar apabila *advice* lebih banyak berasal dari Bapak Sumariyadi.

f. Strategi

Strategi diusulkan oleh Kadji sebagai salah satu indikator pada jejaring kebijakan. Indikator strategi diperlukan pada kegiatan pengelolaan sampah Proklam Sokaku Asri guna mempermudah tercapainya tujuan suatu organisasi dalam keterlibatannya pada kegiatan pengelolaan sampah Proklam Sokaku Asri. Hal ini memiliki kesesuaian dengan teori kebijakan publik oleh Islamy (dalam Anggara, 2014) yang menyatakan bahwa elemen kedua dari suatu kebijakan adalah teknik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Gambar 1.7.
Skema Jejaring Aktor pada Indikator Perintah



Sumber: Analisa Penulis

Berdasarkan skema tersebut di atas, terdapat beberapa strategi yang dilakukan oleh berbagai aktor pada pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah di Dusun Soka. Dari lini pemerintah, DLH Kabupaten Semarang mengusahakan berbagai macam pengembangan inovasi kegiatan yang diperuntukkan bagi kepentingan penilaian serta *branding* dari setiap Proklim pada Sistem Registri Nasional yang dapat diakses oleh setiap penanggung jawab. Masih pada lini pemerintah, Pemerintah Desa Lerep juga memiliki strategi pada kegiatan pengelolaan sampah di Dusun Soka dengan memamerkan hasil kerajinan tangan yang dilakukan sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat. Hasil karya tersebut ditunjukkan sebagai upaya *branding* kepada para pengunjung yang datang ke Desa Lerep baik dalam rangka berwisata ke Desa Wisata Lerep atau

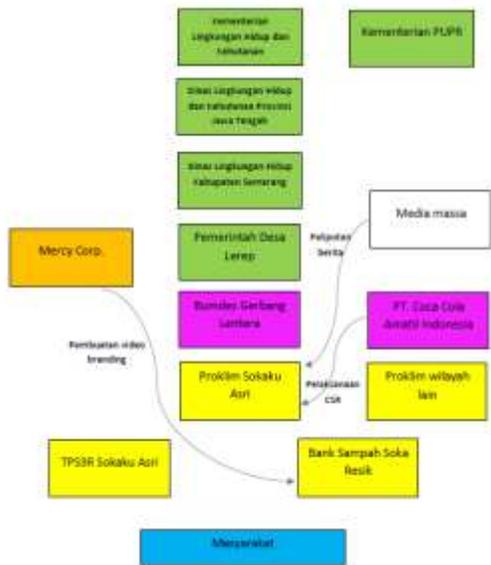
aktor lain yang melakukan kunjungan dalam rangka studi banding Proklim Sokaku Asri.

Strategi lain juga dilakukan oleh kelompok masyarakat dan bersifat pemberdayaan dengan menggalakan kegiatan pilah sampah dari rumah bagi masyarakat Dusun Soka. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya efisiensi bagi setiap pengurus maupun pekerja di kelompok masyarakat yang bersangkutan. Namun begitu, strategi tersebut belum dapat tercapai secara maksimal. Hal ini bisa jadi disebabkan karena masyarakat Dusun Soka, setelah adanya Proklim Sokaku Asri hanya sebatas mengalami perubahan budaya menjaga kebersihan saja, tapi belum sampai pada tahap mengerti urgensi permasalahan perubahan iklim beserta mendukung aksi-aksi mitigasi yang berkelanjutan melalui pengelolaan sampah yang bersifat mendetail. Selain itu, beberapa masyarakat juga merasa bahwa pemilahan sampah telah termasuk fasilitas TPS3R melalui iuran yang dibayarkan, hal tersebut dijelaskan oleh ketua TPS3R Sokaku Asri yang menyebut istilah tersebut dengan “*saya sudah membayar, itu kan tugas pekerja, kalau saya yang memilah lalu pilah sampah akan ngapain?*”

g. Keberadaan Dukungan

Keberadaan dukungan menurut Peraturan Menteri LHK No. P.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim merupakan salah satu aspek pendukung keberlanjutan pelaksanaan pengendalian perubahan iklim di tingkat lokal. Keberadaan dukungan sebagaimana dimaksud merupakan kehadiran pihak eksternal Dusun Soka pada kegiatan pengelolaan sampah. Kehadiran dukungan tersebut dapat bersifat *temporary* atau sementara. Meskipun keberadaan dukungan tidak terlalu menunjukkan peran yang besar dan pengaruh yang signifikan, namun keberadaannya tetap memberi dampak pada pengelolaan sampah Proklim Sokaku Asri.

Gambar 1.8.
Skema Jejaring Aktor pada Indikator
Keberadaan Dukungan



Sumber: Analisa Penulis

Terdapat beberapa keberadaan dukungan dari berbagai aktor pendukung sebagai pihak eksternal yang diberikan dalam rangka pengelolaan sampah di Dusun Soka. Seluruh aktor pendukung tersebut merupakan aktor dari pihak eksternal Dusun Soka, meliputi PT. Coca Cola Amatil Indonesia, Mercy corps, serta lembaga pers. Ketiganya memberikan dukungan melalui peran yang sesuai dengan kekuasaan serta kesesuaian dengan program yang telah ditetapkan oleh masing-masing organisasi.

Dukungan pertama diberikan oleh Mercy Corps sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang perlindungan lingkungan hidup. Mercy Corps juga merupakan organisasi dengan tujuan pemberdayaan masyarakat dalam melewati kondisi krisis, membangun kehidupan yang lebih baik, dan membawa perubahan yang positif. Salah satu aksi yang dilakukan oleh Mercy corps adalah dengan menyediakan alat dan dukungan kepada masyarakat di seluruh Indonesia untuk

mengubah kehidupan sebagai upaya pencapaian tujuan memberdayakan masyarakat dalam membangun komunitas yang sehat, produktif, dan tangguh, sementara dukungan yang diberikan kepada Bank Sampah Soka Resik adalah melalui pembuatan *video branding* yang meliputi metode pembayaran BPJS yang dibayarkan masyarakat dengan mengumpulkan sampah, lalu ditabung di Bank Sampah Soka Resik.

Selain Mercy corps, dukungan lain bagi Proklam Sokaku Asri dilakukan oleh PT. Coca Cola Amatil sebagai sektor privat yang memiliki program *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai bentuk upaya pertanggungjawaban perusahaan terhadap lingkungan di sekitar perusahaan berdiri. Adapun program CSR yang dilakukan adalah dengan memberikan sejumlah tempat sampah yang hingga saat ini terletak di setiap rumah masyarakat yang merupakan anggota TPS3R Sokaku Asri.

Keberadaan dukungan ketiga berasal dari Lembaga pers atau kelompok aktor media massa yang meliputi berita tentang Proklam Sokaku Asri. Lembaga pers tersebut meliputi Suara Merdeka, Jateng Daily, Jateng Pos, Ungaran News, dan Radio Idola. Temuan kendala pada indikator ini adalah upaya *branding* yang lebih banyak dilakukan oleh pihak eksternal atau lembaga pers melalui peliputan kegiatan pengelolaan sampah di Dusun Soka. Hal tersebut ditunjukkan dengan tidak adanya promosi dari pihak internal pengurus dan tidak berjalannya media sosial yang telah dibuat. Pasalnya, hingga hari ini Proklam Sokaku Asri belum memiliki media sosial seperti proklam di wilayah lain yang telah memiliki media *branding*. Salah satu kelompok masyarakat yang telah memanfaatkan potensi media massa justru berasal dari kelompok masyarakat TPS3R Sokaku Asri. Namun begitu, pemanfaatan belum dikatakan baik

karena tidak adanya satu pun konten yang dimuat.

h. Kegiatan Pendukung Lain

Kegiatan pendukung lain Sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri LHK Nomor P.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim, merupakan salah satu aspek pendukung keberlanjutan pelaksanaan pengendalian perubahan iklim di tingkat lokal. Kegiatan pendukung lain juga dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang dimiliki dari setiap aktor, hal tersebut juga yang membuat kegiatan pendukung memiliki berbagai jenis dan tidak tumpang tindih. Selain itu, beberapa kegiatan pendukung juga dilakukan oleh pihak-pihak di luar kelompok masyarakat yang terdapat di Dusun Soka.

Gambar 1.9.
Skema Jejaring Aktor pada Indikator Kegiatan Pendukung Lain



Sumber: Analisa Penulis

Berdasarkan skema terlampir di atas, diketahui terdapat sebuah kegiatan pendukung yang bersumber dari Bintari

Foundation sebagai sebuah LSM bidang perlindungan lingkungan. Dalam keterlibatannya pada pengelolaan sampah, Bintari Foundation dalam kerjasamanya dengan DLH Kabupaten Semarang melaksanakan *workshop* mengenai perubahan iklim serta aksi adaptasi dan mitigasi yang perlu dilakukan dalam rangka mengurangi dampak permasalahan tersebut. *Workshop* tersebut dilakukan empat kali dalam satu tahun yang ditargetkan kepada pegawai DLH Kabupaten Semarang, kelompok masyarakat hingga masyarakat.

i. Keputusan yang akan diambil

Berdasarkan keberjalanan kegiatan pengelolaan sampah yang telah dilakukan, diketahui bahwa setiap aktor yang terlibat kemudian memiliki perencanaan baik dalam jangka panjang, menengah maupun pendek yang akan dilaksanakan guna semakin memajukan Proklim Sokaku Asri terutama dalam pengelolaan sampah.

Gambar 1.10.
Skema Jejaring Aktor pada Indikator Keputusan yang Akan Diambil



Sumber: Analisa Penulis

Berdasarkan skema sebagaimana tergambar di atas, diketahui bahwa terdapat tiga aktor yang memiliki rencana pengambilan keputusan, dan seluruh aktor tersebut berasal dari klasifikasi aktor kelompok masyarakat.

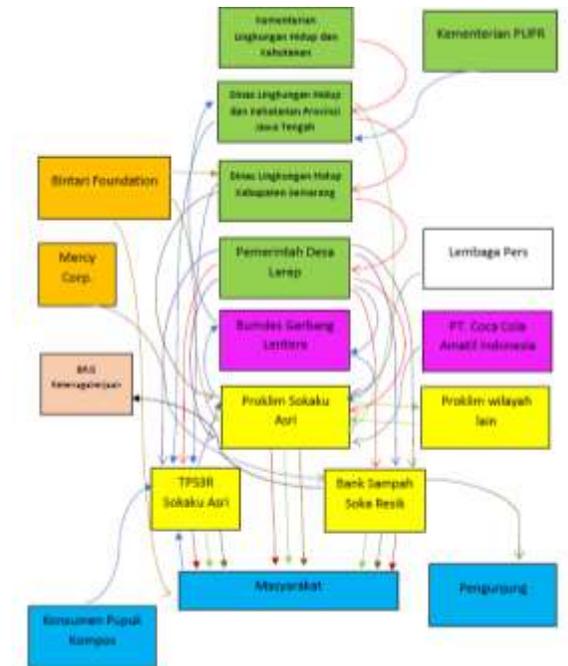
Pertama, pengurus Proklam Sokaku Asri dan TPS3R Sokaku Asri memiliki rencana pengambilan keputusan yang sama terhadap para pekerja TPS3R Sokaku Asri melalui peningkatan pendapatan sehingga kesejahteraan para pekerja dapat terpenuhi dengan baik. Rencana ini dilakukan dengan alasan hingga saat ini, kesejahteraan para pekerja TPS3R Sokaku Asri hanya dapat dikategorikan cukup sehingga beberapa dari para pekerja terpaksa harus mencari pekerjaan lain di luar pekerjaannya di TPS3R Sokaku Asri.

Selain itu, keputusan lain yang akan dilakukan oleh TPS3R Sokaku Asri dan Bank Sampah Soka Resik adalah melalui peningkatan fasilitas yang mampu menunjang kegiatan pengelolaan sampah baik pada TPS3R Sokaku Asri maupun Bank Sampah Soka Resik. Bagi TPS3R, peningkatan sarana dan prasarana dapat dilakukan melalui upaya budidaya mogot yang sempat dimulai namun terhenti karena kendala rusaknya kandang bagi mogot. Mogot sendiri diketahui sebagai hewan yang mampu membantu penguraian sampah organik sehingga harapannya proses budidaya mogot dapat membantu pengelolaan sampah organik di TPS3R Sokaku Asri. Sementara bagi Bank Sampah Soka Resik, upaya peningkatan sarana dan prasarana akan dilakukan melalui pemanfaatan alat pengolah sampah plastik menjadi bioenergi atau energi terbarukan yang dapat meliputi minyak tanah dan bahan sejenis premium.

j. Aktor yang Mempengaruhi dan Dipengaruhi

Bagian ini akan menjelaskan tentang aktor yang mempengaruhi aktor lain berdasarkan setiap indikator. Adapun jenis pengaruh ditandai dengan perbedaan warna garis pengaruh yang tergambar pada skema. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, penulis membentuk sebuah skema jejaring aktor pada kegiatan pengelolaan sampah di Dusun Soka yang tergambar sebagai berikut:

Gambar 1.11.
Skema Jejaring Aktor pada Kegiatan Pengelolaan Sampah Dusun Soka



Sumber: Analisa Penulis

Berdasarkan tabel terlampir di atas, peneliti menemukan bahwa terdapat 52 (lima puluh dua) pengaruh yang diberikan oleh para aktor dengan rincian pengaruh pada indikator tujuan keterlibatan sebanyak 13 (tiga belas) pengaruh, indikator penganggaran kegiatan sebanyak 9 (sembilan) pengaruh, pada indikator data dan informasi sebanyak 6 (enam) pengaruh, pada indikator perintah sebanyak 6 (enam) pengaruh, pada indikator pemberian *advice* sebanyak 3 (tiga) pengaruh, indikator strategi

sebanyak 6 (enam) pengaruh, indikator keberadaan dukungan sebanyak 3 (tiga) pengaruh, indikator kegiatan pendukung lain sebanyak 3 (tiga) pengaruh, serta indikator keputusan yang akan diambil sebanyak 3 (tiga) pengaruh.

Meski telah banyak aktor dari berbagai klasifikasi yang telah andil pada kegiatan pengelolaan sampah Dusun Soka, muncul temuan bahwa belum terdapat peran dari akademisi baik dalam kegiatan pengelolaan sampah di Dusun Soka. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian implementasi kegiatan pengelolaan sampah Dusun Soka dengan Strategi Pelaksanaan Proklam di Provinsi Jateng yang menyatakan bahwa seluruh implementasi Proklam telah melibatkan kerjasama antapihak termasuk akademisi.

k. Besaran Pengaruh

Beberapa aktor memiliki tingkat peran yang berbeda dalam pengelolaan sampah Dusun Soka. Tingkat peran tersebut dilihat dari besarnya jumlah aktor mempengaruhi setiap *stakeholder* dari indikator pada poin 4.1.1. hingga 4.1.9. Tingkat peran aktor dalam skema Schiffer sendiri ditunjukkan dengan tinggi menara pada skema jejaring kebijakan.

Tabel 1.1.

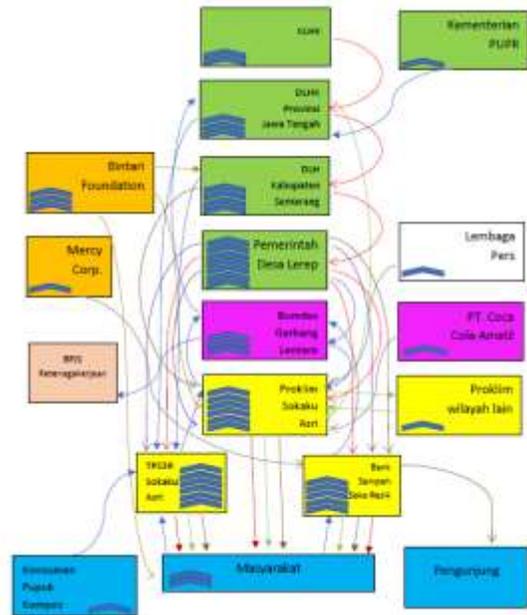
Tabel Besaran Pengaruh Aktor

Aktor	Jumlah Mempengaruhi	Jumlah Dipengaruhi
Masyarakat Dusun Soka	2	10
TPS3R Sokaku Asri	6	7
Bank Sampah Soka Resik	3	6
Proklam Sokaku Asri	6	10
BUMDes Gerbang Liris	3	2
Pemerintah Desa Lerep	3	2
DLH Kabupaten Semarang	4	4
DLH Provinsi Jawa Tengah	3	3
Kementerian LHK	2	0
Kementerian PUPH	1	0
Bisnis Foundation	3	0
Mercy Corp.	1	0
PT. Coca Cola Amati Indonesia	1	0
Media Massa	1	0
Komisioner Pupuk Kompos	1	0
Proklam wilayah lain	1	1
BPS Ketersagkegyaan	0	1

Sumber: Analisa Penulis

Tabel terlampir di atas merupakan hasil perhitungan besaran pengaruh yang diberikan oleh sebuah aktor, dan sebaliknya besaran pengaruh yang diterima oleh sebuah aktor. Adapun berikut merupakan skema jejaring aktor dengan besaran pengaruh sebagaimana telah dianalisa sebelumnya:

Gambar 1.12.
Skema Jejaring Aktor pada Kegiatan Pengelolaan Sampah Dusun Soka dengan Besaran Pengaruh



Sumber: Analisa Penulis

Berdasarkan skema dan tabel tersebut di atas, diketahui bahwa Pemerintah Desa Lerep memiliki peran paling besar karena mampu memberikan tujuh buah pengaruh kepada aktor lain dengan rincian meliputi Proklam Sokaku Asri, TPS3R Sokaku Asri, Bank Sampah Soka Resik, pada indikator berbeda.

Berasal dari klasifikasi kelompok masyarakat, Proklam Sokaku Asri dan TPS3R Sokaku Asri masing-masing memberikan enam pengaruh, dan disusul oleh Bank Sampah Soka Resik yang memberikan lima pengaruh, sehingga tampak bahwa ketiga kelompok masyarakat tersebut memiliki

pengaruh yang kuat pada kegiatan pengelolaan sampah di Dusun Soka.

DLHK Provinsi Jawa Tengah dan DLH Kabupaten Semarang memiliki pengaruh sedang yang tampak karena masing-masing memberikan tiga buah pengaruh kepada aktor lain. Disusul dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan dua buah pengaruh, serta Kementerian PUPR dengan sebuah pengaruh.

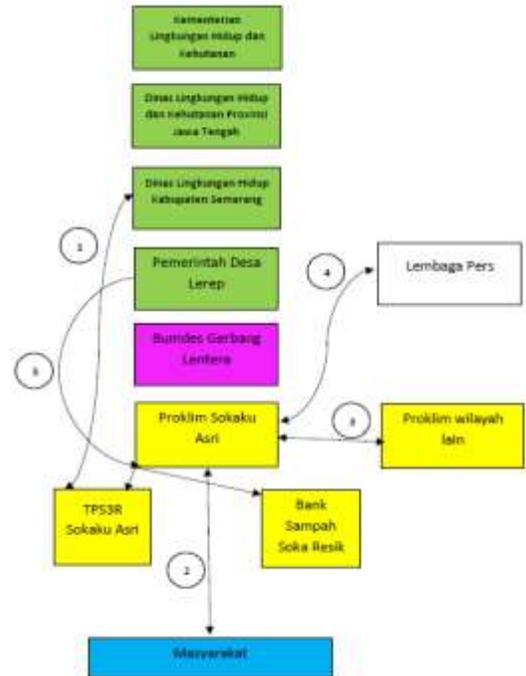
Klasifikasi aktor lain yang juga berpengaruh adalah lembaga swadaya masyarakat meliputi Bintari Foundation dengan tiga buah pengaruh serta Mercy corps dengan sebuah pengaruh. Selain itu, terdapat pula beberapa aktor lain dari sektor privat meliputi BUMDes Gerbang Lentera yang memiliki tiga pengaruh serta PT. Coca Cola Amatil Indonesia yang hanya memiliki satu buah pengaruh.

Dari lini masyarakat, hanya terdapat dua buah pengaruh yang ditujukan kepada TPS3R Sokaku Asri dan Bank Sampah Soka Resik, sementara konsumen pupuk kompos hanya memberikan sebuah pengaruh kepada TPS3R Sokaku Asri. Dua klasifikasi aktor lain yang juga terlibat adalah kelompok masyarakat yang bersifat eksternal, yaitu Proklim dari wilayah lain dengan sebuah pengaruh serta Lembaga pers yang keduanya memberikan pengaruh kepada Proklim Sokaku Asri.

I. Hubungan Saling Menguntungkan

Hubungan saling menguntungkan merupakan hasil dari interaksi dua pihak yang menghasilkan keuntungan bagi setiap pihak. Pada subbab ini, jika hubungan yang muncul bersifat saling menguntungkan, maka panah tersebut menunjukkan dua kepala (Schiffer, 2008). Terdapat 5 hubungan saling menguntungkan antar aktor pada kegiatan pengelolaan sampah Dusun Soka yang digambarkan melalui skema berikut:

Gambar 1.12.
Skema Hubungan Saling Menguntungkan



Sumber: Analisa Penulis

Berdasarkan skema tersebut di atas, diketahui terdapat lima hubungan aktor yang bersifat saling menguntungkan melalui keterlibatannya pada kegiatan pengelolaan sampah di Dusun Soka. *Pertama*, hubungan antara DLH Kabupaten Semarang dan TPS3R Sokaku Asri. Hubungan yang terjadi adalah pengalokasian APBD oleh DLH Kabupaten Semarang kepada TPS3R Sokaku Asri sebesar Rp. 500.000,00 – Rp. 600.000,00 yang digunakan sebagai bantuan operasional BBM mesin di TPS3R Sokaku Asri serta dua buah motor tossa. Sebagai imbal balik, TPS3R Sokaku Asri dengan tidak terikat kewajiban memberi pupuk kompos yang digunakan sebagai pupuk tanaman yang ditanam di sekitar lingkungan DLH Kabupaten Semarang.

Kedua, hubungan antara masyarakat Dusun Soka dan Proklim Sokaku Asri. Dampak nyata yang paling dirasakan oleh masyarakat Dusun Soka adalah kebersihan lingkungan Dusun Soka dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan serta terciptanya

lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat, sementara manfaat yang diperoleh kelompok masyarakat Proklam Sokaku Asri termasuk dua kelompok masyarakat yang dinaungi adalah berjalannya berbagai kegiatan sebagaimana ditentukan berdasarkan visi dan misi organisasi tersebut.

Ketiga, hubungan antara Proklam Sokaku Asri dan Proklam di wilayah lain. Hubungan tersebut tampak melalui kegiatan studi banding yang dilaksanakan secara berkala. Kegiatan tersebut dilakukan melalui penerimaan studi banding dari wilayah lain ke Proklam Sokaku Asri atau sebaliknya. Kegiatan ini bertujuan sebagai sarana pertukaran pengetahuan, informasi serta pengalaman dalam berbagai kegiatan di bawah payung proklam terutama dalam hal pengelolaan sampah di masing-masing wilayah, serta upaya dalam menjalin relasi antar proklam. Salah satu kegiatan studi banding yang dilakukan dan memiliki relevansi dengan kegiatan pengelolaan sampah adalah studi banding yang dilakukan ke Proklam Tepungsari, Desa Walitelon, Kabupaten Temanggung dengan alasan Kabupaten Temanggung dikenal dengan pengelolaan sampah yang sangat baik.

Keempat, hubungan antara Proklam Sokaku Asri dan lembaga pers. Hubungan tersebut tampak melalui berbagai pemberitaan mengenai Proklam Sokaku Asri sehingga kewajiban lembaga pers dalam peliputan berita terpenuhi, sementara Proklam Sokaku Asri mendapat *branding* kepada pihak eksternal. Beberapa berita yang meliput Proklam Sokaku Asri meliputi Ungaran News dengan judul berita Sumariyadi Sosok Berjasa di Balik Sukses Program Proklam Dusun Soka, Jateng Daily dengan judul Proklam Dusun Soka Lerep Bersaing di Tingkat Nasional, dan lain sebagainya.

Kelima, hubungan antara Pemerintah Desa Lerep dan kelompok masyarakat. Hubungan

saling menguntungkan yang dibangun antara Pemdes Lerep dan Proklam Sokaku Asri beserta dua kelompok masyarakat yang dinaungi timbul melalui kelompok masyarakat yang memperoleh bimbingan dari Kepala Desa Lerep terkait berbagai kegiatan pengelolaan sampah di Dusun Soka, sementara timbal balik keuntungan yang diperoleh Pemerintah Desa Lerep adalah *branding* desa yang baik pada publik secara luas dengan keberadaan kegiatan pengelolaan sampah Dusun Soka.

KESIMPULAN

Pada kegiatan pengelolaan sampah di Dusun Soka, terdapat tujuh belas keterlibatan aktor yang berasal dari klasifikasi aktor instansi pemerintah, sektor privat, masyarakat, kelompok masyarakat, LSM, serta media massa. Keterlibatan para aktor tersebut ditunjukkan oleh setiap pengaruh yang diberikan sesuai dengan tugas pokok serta kewenangannya sehingga membentuk jejaring dengan jenis dan tingkat pengaruh yang berbeda. Berdasarkan teknik pemetaan *net mapping*, jejaring tersebut menunjukkan bahwa terdapat 52 pengaruh yang dihasilkan serta 5 hubungan yang saling menguntungkan.

Selain itu, penelitian ini juga menjelaskan bahwa keberhasilan pemberdayaan pada kegiatan pengelolaan sampah Dusun Soka bergantung pada siapa pelaku pemberdayaan yang terlibat dan apa pengaruh yang diberikan.

Penulis juga menemukan analisis berbagai permasalahan yang muncul meliputi:

- a. Pada indikator penganggaran kegiatan, penulis menemukan kendala berupa tumpang tindih kewenangan antara TPS3R Sokaku Asri dan Bank Sampah Soka Resik dalam pengelolaan sampah non-organik yang disebabkan karena minimnya koordinasi antara Bank Sampah Soka Resik dan TPS3R Sokaku Asri.

Kondisi ini menjadi tidak ideal karena tidak sesuai dengan ketentuan petunjuk Teknis TPS3R dimana kewenangan pengelolaan sampah non-organik adalah milik bank sampah sehingga berpengaruh pada berkurangnya pendapatan bagi Bank Sampah Soka Resik.

- b. Pada indikator data dan informasi, Terdapat dua buah kendala yang ditemukan pada indikator ini. *Pertama*, terdapat kesulitan dalam pengisian Sistem Registri Nasional karena sumber daya manusia yang minim dalam pengetahuan lingkungan hidup secara detail sementara data yang diminta pada SRN bersifat sangat rigid. Selama ini, pengisian SRN hanya dilakukan oleh sekretaris Proklim seorang diri. *Kedua*, proses *monitoring* dan evaluasi yang seringkali dilewatkan lantaran kesibukan pengurus yang berbeda-beda. Padahal, *monitoring* dan evaluasi merupakan proses penting yang dapat menunjang optimalisasi pengisian *form* SRN melalui penilaian kekurangan dalam keberlangsungan program. Hal ini disebabkan karena kesibukan setiap pengurus yang berbeda-beda di luar tanggung jawab sebagai pengurus proklim.
- c. Pada indikator strategi, Penulis juga menemukan dua buah kendala pada kegiatan pilah sampah dari rumah. *Pertama*, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap permasalahan perubahan iklim sehingga hanya sebatas perubahan budaya yang terjadi hanya sebatas menjaga lingkungan. *Kedua*, masyarakat juga kurang memahami keberlanjutan arah gerak proklim sehingga terkadang menyebabkan kejenuhan dalam berkontribusi pada kegiatan pengelolaan sampah. Kedua masalah tersebut terjadi karena masyarakat kurang memahami bahaya dari dampak perubahan iklim yang disebabkan karena sulitnya memahami

istilah yang berhubungan dengan perubahan iklim maupun Proklim, seperti upaya adaptasi, mitigasi, gas rumah kaca, dan lain sebagainya.

- d. Pada indikator keberadaan dukungan, Penulis menemukan kendala meliputi proses *branding* yang dilakukan terhadap kegiatan ini hanya dilakukan oleh lembaga pers sebagai pihak eksternal dan tidak diupayakan oleh pihak internal Proklim Sokaku Asri dan 2 kelompok masyarakat lain yang dinaungi. Kendala ini muncul karena sumber daya yang kurang memadai dalam hal pengelolaan media.
- e. Penulis juga menemukan ketidakterlibatan peran akademisi dalam kegiatan pengelolaan sampah Dusun Soka baik dalam kegiatan penelitian maupun pengabdian.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan beberapa saran meliputi:

- a. Dalam menyelesaikan permasalahan tumpang tindih peran, kelompok masyarakat TPS3R Sokaku Asri dan Bank Sampah Soka Resik diharapkan dapat mengoptimalkan koordinasi dalam pembagian kewenangan pengelolaan sampah non-organik sebagaimana ditetapkan oleh Ditjen PPLP. Upaya ini dapat didukung dengan menggalakkan pilah sampah dari rumah sehingga pengambilan sampah oleh petugas TPS3R Sokaku Asri hanya dilakukan bagi sampah organik atau dapat dilakukan dengan cara TPS3R Sokaku Asri menyerahkan hasil pemilahan sampah non-organik kepada Bank Sampah.
- b. Upaya evaluasi dan *monitoring* baik secara internal maupun eksternal dengan kelompok masyarakat lain yang dinaungi perlu dilakukan secara berkala sebagaimana terjadwalkan, yaitu satu kali setiap bulan untuk menilai,

- membantu pengisian SRN, serta mendukung peningkatan pelayanan.
- c. Proses *branding* oleh internal pengurus Proklam Sokaku Asri perlu diupayakan dengan optimal dengan cara mengaktifkan kembali media sosial yang berisi reportase kegiatan yang dilakukan. Media sosial juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana promosi penjualan pupuk kompos yang dihasilkan oleh TPS3R Sokaku Asri dan hasil karya kerajinan tangan dari Bank Sampah Soka Resik.
 - d. Pada proses sosialisasi, para sosialisator diharapkan dapat menghindari istilah-istilah yang sulit dimengerti sehingga masyarakat dapat lebih mudah memahami konteks permasalahan perubahan iklim. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengubah beberapa istilah ilmiah menjadi istilah yang dikenal sehari-hari seperti aksi mitigasi menjadi upaya pengurangan, aksi adaptasi menjadi upaya penyesuaian diri, atau mengubah istilah tersebut dengan aksi nyata atau percontohan, seperti alih-alih mengartikan gas rumah kaca, sosialisator dapat menjelaskannya dengan dampak yang akan dirasakan masyarakat. Melalui upaya ini, diharapkan masyarakat dapat berkontribusi secara optimal dalam mencegah dampak perubahan iklim.
 - e. Kontribusi yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Soka diharapkan bersifat konsisten dan konteks permasalahan perubahan iklim dapat dipahami secara jangka panjang sehingga perubahan budaya tidak hanya sebatas menjaga kebersihan saja, tapi juga melakukan upaya pendukung seperti memilah sampah dari rumah dan memahami bahwa upaya ini mendorong optimalisasi pelayanan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh kelompok masyarakat terkait.

- f. Proklam Sokaku Asri terutama dalam kegiatan pengelolaan sampah dapat menjadi rekomendasi bagi pihak akademisi sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam hal keilmuan. Pihak akademisi dapat memanfaatkannya untuk pelaksanaan penelitian maupun pengabdian sebagaimana keduanya merupakan dua dari tiga poin tri dharma perguruan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. (2014) *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hayat, H. (2018) *Buku Kebijakan Publik*. Bandung: Intrans Publishing. Available at: https://www.researchgate.net/publication/335788910_Buku_Kebijakan_Publik.
- Kementerian PUPR (2017) *Petunjuk Teknis TPS3R*. Available at: <http://plpbm.pu.go.id/v2/assets/file/PetunjukTeknisTPS3R2017.pdf>.
- LANRI (2015) *Modul III : Pemetaan Pemangku Kepentingan (Stakeholders Mapping)*. Jakarta.
- Mahsun, Moh. 2019. *Penganggaran Sektor Publik*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Masripatin, N. (2017) *STRATEGI IMPLEMENTASI NDC (NATIONALYDETERMINEDCONTRIBUTION)*. Edited by N. Masripatin. Jakarta: Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Schiffer, E. (2008) 'Tracing Power and Influence in Networks Net-Map as a Tool for Research and Strategic Network Planning', *International Food Policy Research Institute*. Available at: https://www.researchgate.net/publication/5056701_Tracing_Power_and_Influence_in_Networks_Net-map_as_a_tool_for_research_and_strategic_network_planning.